

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kontribusi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir, yaitu tepatnya dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat kontribusi sektor UKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen, tidak hanya itu sektor UKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, serapan tenaga kerja pada sektor UKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen (Mutmainah, 2016).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa. UKM memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. UKM memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Dengan adanya UKM bangsa Indonesia dapat membangun perekonomian nasional.

Berdasarkan data-data yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa UKM mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, namun potensi yang cukup besar dari UKM tersebut sering terkendala masalah modal untuk pengembangan usahanya, untuk melakukan pengembangan suatu usaha tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar. Banyak program yang dilakukan pemerintah dalam bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang

bisa didapatkan pada beberapa bank tertentu. Salah satu syarat yang diberikan oleh pihak pemberi kredit tersebut adalah laporan keuangan UKM yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, Permasalahan lain adalah belum ada pemisahan antara uang pribadi dengan uang perusahaan, padahal untuk menjalankan usahanya menjadi lebih baik, selain membutuhkan dana yang besar juga perlu adanya pemisahan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Keuangan usaha dan keuangan pribadi yang disatukan dapat mempersulit melakukan monitoring pendapatan atau pengeluaran. Dengan memisahkan pencatatan keuangan usaha dengan keuangan pribadi akan lebih mudah membedakan antara arus dana dari usaha dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, selain itu juga dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai keadaan finansial usaha (Wirawan, 2014).

Kendala utama yang menjadi fokus dalam pengembangan UKM selain modal adalah pengelolaan keuangan di dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan keuangan yang baik memerlukan keterampilan Akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis UKM (Handayani, 2009:1), namun praktik akuntansi pada UKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan, untuk itulah dengan ditetapkannya SAK ETAP diharapkan UKM dapat menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar penyusunan laporan keuangan guna Entitas tidak dengan Akuntabilitas Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada

tahun 2009. SAK ETAP tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2011. Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah UKM (yang jumlahnya hampir 90% dari total perusahaan di Indonesia) dalam menyusun laporan keuangan mereka dan dalam penyelesaian masalah internal perusahaannya. SAK ETAP diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan standar pelaporan pada UKM dalam membuat laporan keuangan yang mudah, transparan, dan akuntabel (Darmajati, 2007).

Apabila SAK ETAP telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu lagi menggunakan PSAK umum yang berlaku dalam membuat laporan keuangan mereka. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan dibandingkan PSAK dengan ketentuan laporan yang lebih kompleks.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. (IAI, 2009)

Pada kenyataannya hingga saat ini SAK ETAP masih dianggap memberatkan UKM dan tingkat kebutuhan SAK ETAP masih sangat rendah. Sistem pembukuan UKM selama ini dinilai sangat sederhana dan cenderung mengabaikan standar yang berlaku untuk laporan keuangan. Hal ini dikarenakan

para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya, diantaranya dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dapat mempermudah perusahaan memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya melalui kredit perbankan. Munculnya permasalahan ini bisa jadi dikarenakan faktor internal pengelola itu sendiri seperti kurangnya pemahaman mengenai akuntansi, pemahaman terhadap teknologi informasi dan kurangnya keandalan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Soraya dan Mahmud (2016), bertujuan untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK ETAP pada UKM diantaranya, faktor tingkat pendidikan pemilik, ukuran usaha, dan umur usaha. Hasil dari penelitian menunjukkan, tingkat pendidikan pemilik dan ukuran usaha berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, hal ini di dasarkan karena keberhasilan seorang pemilik usaha tergantung pada pendidikan dan kemampuan belajarnya dalam lingkungan usaha, selain itu juga semakin besar skala usaha maka pemilik memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya (*growth*) dan menjaga eksistensi usahanya sehingga pemilik UKM akan mulai memandang pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Dalam penelitian ini umur usaha tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, hal ini bisa jadi karena meskipun usaha yang dijalankan telah berlangsung lama pemilik usaha tidak memperhatikan pencatatan akuntansi.

Penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Maharani (2015), penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan pemilik UKM, jenjang pendidikan pemilik UKM, lama usaha, ukuran usaha terhadap pemahaman UKM atas SAK ETAP. Pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman UKM atas SAK ETAP karena, UKM yang pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan khusus terkait SAK ETAP maka pemilik memiliki kemauan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan informasi yang diberikan tentang apa SAK ETAP bagi UKM merupakan suatu faktor yang menentukan pemahaman UKM atas SAK ETAP. Latar belakang pendidikan dan ukuran usaha juga berpengaruh terhadap pemahaman UKM atas SAK ETAP, karena pengusaha UKM dengan latar pendidikan Akuntansi akan memiliki pemahaman SAK ETAP yang lebih baik dibandingkan dengan pengusaha UKM dengan latar belakang pendidikan Non Akuntansi, selain itu jika ukuran usaha suatu UKM tinggi maka cenderung memiliki pendapatan yang tinggi pula, sehingga semakin baik pula pemahaman UKM atas SAK ETAP. Jenjang pendidikan dan lama usaha tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman UKM atas SAK ETAP, jenjang pendidikan dan lamanya UKM berusaha tidak menentukan tinggi rendahnya pemahaman UKM atas SAK ETAP.

Usaha Kecil dan Menengah yang melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP memiliki kendala-kendala diantaranya, latar belakang pendidikan pemilik, jenjang pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, ukuran usaha, lama usaha,

serta pemberian informasi dan sosialisasi pemahaman SAK ETAP. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh Zahro dan Wahyundaru (2015) dengan hasil penelitian bahwa pendidikan pemilik, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan skala usaha berpengaruh positif sedangkan pemahaman terhadap teknologi informasi dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh negatif terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.

Penelitian yang sama sebelumnya dilakukan oleh Aufar (2013) dengan hasil penelitian bahwa jenjang pendidikan pemilik, ukuran usaha, lama usaha dan latar belakang pendidikan berpengaruh secara signifikan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Dewi (2016) dengan hasil penelitian yang berbeda bahwa latar belakang pendidikan, skala usaha dan umur usaha berpengaruh negatif, sedangkan faktor pengetahuan akuntansi yang dimiliki memiliki pengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas dan dari hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa masih sulitnya UKM menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang menentukan kebutuhan SAK ETAP bagi UKM. Penelitian mengambil tempat di kota Gresik, peneliti memilih kota Gresik sebagai lokasi penelitian selain karena merupakan kota tempat tinggal peneliti, juga karena banyaknya UKM yang ada di kota Gresik dan beberapa jenis usaha tersebut bergerak di bidang makanan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh pada kebutuhan SAK ETAP bagi UKM?
2. Apakah karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh pada kebutuhan SAK ETAP bagi UKM?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada kebutuhan SAK ETAP bagi UKM?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh pada kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.
2. Untuk mengetahui apakah karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh pada kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang Akuntansi khususnya mengenai Akuntansi untuk UKM atau SAK ETAP, dan juga merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik.

2. Bagi UKM

Sebagai masukan lebih lanjut dalam merumuskan tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan adanya penerapan SAK ETAP bagi laporan keuangan UKM.

3. Bagi Mahasiswa Akuntansi atau Peneliti Lain

Menambah literatur untuk penelitian sejenis, dan juga sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya, alasan peneliti mereplikasi penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Penelitian ini juga mengubah lokasi obyek penelitian, studi kasus pada lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu

di wilayah kota Gresik. Kota Gresik dipilih untuk obyek penelitian selain karena merupakan kota tempat tinggal peneliti, juga karena terdapat banyak UKM yang bergerak di bidang makanan, UKM di bidang makanan menjadi fokus peneliti untuk mengambil sampel penelitian.

Penelitian ini, melakukan penelitian kembali dengan menggabungkan antara penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan SAK ETAP bagi UKM” dengan variabel independen yang dipilih yaitu pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependennya yaitu kebutuhan SAK ETAP.